

PENGARUH KOMUNIKASI PEMERINTAH KOTA PONTIANAK TERHADAP IMPLEMENTASI KAWASAN TANPA ROKOK MENUJU KOTA LAYAK ANAK

PENULIS

¹⁾Nurul Atikah, ²⁾Andi Supiyandi, ³⁾Joshua Fernando, ⁴⁾Hildawati

ABSTRAK

Jumlah perokok di Kota Pontianak, khususnya pada kelompok usia produktif masih tergolong tinggi. Hal ini menjadi tantangan serius bagi pemerintah dalam mensosialisasikan kebijakan serta menjaga kualitas kesehatan publik, situasi tersebut juga berpotensi menghambat upaya pemerintah kota Pontianak dalam mewujudkan kota Layak Anak (KLA) yang bebas dari paparan asap rokok. Hal ini selaras dengan komitmen tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) nomor 3 mengenai kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan publik. Permasalahan utama yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah belum terimplementasinya aturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Oleh karena itu, tujuan penelitian ini ingin mengetahui pengaruh komunikasi Pemerintah Kota Pontianak terhadap implementasi KTR. Penelitian ini pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif. Populasi yang menjadi objek penelitian adalah masyarakat Kota Pontianak yang berusia antara 15 hingga 54 tahun dan merupakan perokok aktif. Teknik pengambilan sampel yang diterapkan adalah *accidental sampling*, dengan total sampel sebanyak 100 responden. Teori yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edwards III. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi Pemerintah Kota Pontianak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap implementasi KTR. Temuan ini menegaskan bahwa penyampaian komunikasi kebijakan yang efektif berperan penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, serta mendukung terwujudnya Kota Pontianak sebagai Kota Layak Anak (KLA).

Kata Kunci

Komunikasi Kebijakan, Kawasan Tanpa Rokok, Kota Layak Anak

ABSTRACT

Smoking prevalence among the productive-age population in Pontianak City remains considerably high, posing a persistent challenge for the local government in promoting public health and enforcing tobacco control regulations. This condition potentially hinders the realization of a Child-Friendly City (KLA) that is free from cigarette smoke exposure and aligns with Sustainable Development Goal (SDG) No. 3, which advocates for ensuring healthy lives and promoting well-being for all at all ages. The study investigates the influence of government communication on the implementation of the Smoke-Free Area policy in Pontianak City. Employing a quantitative approach with an associative research design, data were collected from 100 respondents aged 15–54 years who are active smokers using an accidental sampling technique. Edwards III's policy implementation theory served as the analytical framework to assess communication variables such as transmission, clarity, and consistency. The findings reveal that the Pontianak City Government's communication exerts a positive and significant effect on the implementation of KTR. The results highlight that effective policy communication is a crucial determinant in enhancing public awareness, fostering behavioral compliance, and supporting public health goals consistent with SDG 3 and the vision of Pontianak as a Child-Friendly City.

Keywords

Policy Communication, Smoke-Free Area, Child-Friendly City

AFILIASI

Prodi, Fakultas

^{1,2,3)}Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

⁴⁾Antropologi Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Nama Institusi

¹⁻⁴⁾Universitas Tanjungpura

Alamat Institusi

¹⁻⁴⁾Jl. Prof. Dr. Hadari Nawawi, Bansir Laut, Pontianak Tenggara, Pontianak, Kalimantan Barat

KORESPONDENSI

Penulis

Nurul Atikah

Email

e1101231049@student.untan.ac.id

LICENSE



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

I. PENDAHULUAN

Perilaku merokok telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sosial sebagian masyarakat, sehingga aktivitas ini kerap dianggap sebagai kebiasaan yang wajar, padahal kenyataannya kegiatan merokok merampas hak orang lain dalam hal menghirup udara segar dan kesehatan (Pratama et al., 2021). Hal ini dikarenakan banyak kegiatan merokok yang dilakukan tanpa melihat tempat, seperti di pelayanan kesehatan, angkutan umum, tempat ibadah, juga fasilitas umum lainnya.

Menurut laporan dari World Health Organization (2021) *Indonesia Report 2021*, memberikan informasi terperinci tentang penggunaan produk tembakau dan indikator utama pengendalian tembakau di Indonesia, menunjukkan bahwa 34,5% orang dewasa, atau 70,2 juta orang, menggunakan tembakau. Persentase penggunaan tembakau pada laki-laki adalah 65,5% dan pada perempuan 3,3%. Melansir dari Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat, sebanyak 83,16% orang dengan usia produktif rentang 15-54 tahun merupakan perokok aktif di Kota Pontianak per tahun 2023. Persentase ini menegaskan bahwa perilaku merokok masih menjadi persoalan yang serius.

World Health Organization (2021) menyatakan terdapat lebih dari 7 juta kematian setiap tahunnya, serta kecacatan dan penderitaan jangka panjang akibat penyakit yang berhubungan dengan tembakau. Produk tembakau yang paling umum digunakan adalah rokok. Selain itu, beberapa produk tembakau lain seperti cerutu, tembakau linting, tembakau pipa, bidis dan kretek, serta produk tembakau tanpa asap. Namun, apapun itu bentuknya, World Health Organization (WHO) juga menyatakan bahwa semua bentuk tembakau termasuk kategori berbahaya.

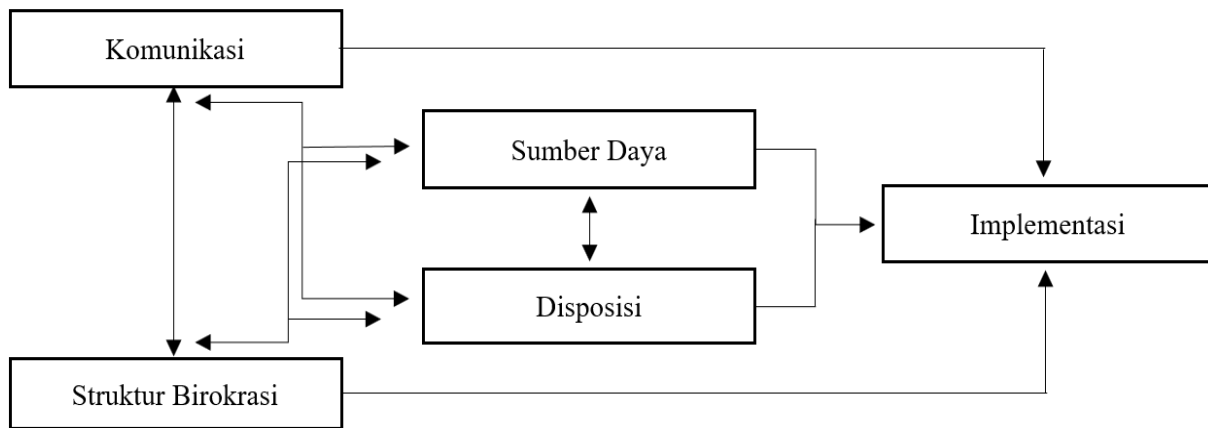
Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Kota Pontianak mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2010 terkait Penetapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Mengutip dari KalbarSatu.com, Dalam implementasinya, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menegaskan bahwa sosialisasi KTR dilakukan secara merata, tidak hanya di ruang publik umum, tetapi juga di lingkungan sekolah, kawasan perkantoran, hingga destinasi wisata, sebagai bentuk komitmen untuk melindungi masyarakat dari bahaya asap rokok dan menciptakan kualitas udara yang lebih sehat. Kondisi ini juga sejalan dengan komitmen pemerintah dalam mewujudkan **Kota Layak Anak (KLA)**, di mana salah satu indikator utamanya adalah terpenuhinya hak anak atas lingkungan yang sehat dan bebas dari paparan asap rokok.

Kota Pontianak telah ditetapkan sebagai Kota Layak Anak (KLA) dengan kategori Madya di Indonesia untuk kelima kalinya. Sebelumnya Kota Pontianak pernah mendapatkan penghargaan KLA pada tahun 2011 dan 2012 untuk kategori Pratama. Kemudian pada tahun 2013, 2015, dan 2017, kembali dinobatkan sebagai KLA untuk kategori Menengah. KLA bukan sekadar label, melainkan kebijakan pembangunan kota yang mengutamakan hak dan perlindungan anak sebagai bagian integral dari penyusunan program kota.

Dalam mendukung Perda KTR, Pemerintah Kota Pontianak telah menjalankan berbagai bentuk komunikasi kebijakan seperti adanya deklarasi bersama sejumlah mitra. Pemkot menegaskan komitmennya dalam melindungi anak-anak dan kelompok rentan dari bahaya asap rokok (Kalbar erda, 2022). Selain itu, pengawasan dan penegakkan Perda KTR juga dilakukan oleh Tim Satgas di ruang publik yang rawan pelanggaran (Dinas Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana, 2024). Tempat-tempat seperti kafe, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya menjadi sarana edukasi langsung dengan memberikan pembinaan kepada pengelola maupun pengunjung (Barage, 2024).

Namun, implementasi yang telah dicanangkan masih terdapat kelemahan. Pesan komunikasi belum sepenuhnya merata, terlihat dari pemberitaan media yang mengindikasikan bahwa kepatuhan di ruang publik seperti kafe dan penginapan masih lebih rendah dibandingkan dengan sekolah atau sarana kesehatan. Sosialisasi yang dilakukan kerap dinilai hanya bersifat formalitas dan belum melibatkan masyarakat secara menyeluruh. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi publik yang belum optimal menjadi tantangan utama dalam mendukung implementasi KTR.

Penelitian ini berlandaskan pada **teori komunikasi** yang menekankan bagaimana proses penyampaian kebijakan publik dilakukan secara sistematis kepada masyarakat. Teori yang digunakan **model implementasi kebijakan Edwards III**, yang menyatakan bahwa faktor-faktor seperti komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur organisasi sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Aspek Komunikasi pada teori ini menekankan transmisi, kejelasan pesan, serta konsistensi informasi yang disampaikan agar tujuan kebijakan dapat tercapai.



Gambar 1. Model Edwards III

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini berupaya menganalisis pengaruh komunikasi Pemerintah Kota Pontianak dalam implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) kepada masyarakat. Kajian ini diharapkan dapat membantu dalam meningkatkan implementasi Kawasan Tanpa Rokok di Kota Pontianak.

II. METODE PENELITIAN

Menurut Sugiyono (dalam Supiyandi et al., 2025) metode survei merupakan salah satu metode penelitian dengan pendekatan kuantitatif yang digunakan untuk mendapatkan informasi atau data terkait berbagai hal yang terjadi saat ini maupun yang pernah terjadi di masa lampau. Data yang dikumpulkan melalui survei bisa mencakup hal-hal seperti pandangan atau kepercayaan individu, pendapat terhadap suatu isu, karakteristik pribadi, kebiasaan atau perilaku, hingga bagaimana suatu variabel berhubungan dengan variabel lainnya. Survei biasanya dilakukan melalui penyebaran kuesioner atau wawancara kepada responden yang dianggap mewakili populasi tertentu. Metode ini efektif digunakan ketika peneliti ingin mengetahui gambaran umum atau pola dari sekelompok orang berdasarkan data yang dapat diukur dan dianalisis secara statistik.

Penelitian ini mengimplementasikan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian asosiatif, yang bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh antara dua variabel yang diteliti, yaitu pengaruh komunikasi (variabel X) terhadap implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) menuju Kota Layak Anak (variabel Y). Pendekatan ini dipilih karena mampu menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala yang membuat penelitian asosiatif mempunyai tingkatan tertinggi dibandingkan dengan deskriptif dan komparatif.



Gambar 2. Kerangka Berpikir

Objek penelitian ini adalah implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kota Pontianak, sedangkan subjek penelitian adalah masyarakat Kota Pontianak yang merupakan perokok aktif dengan rentang usia 15–54 tahun. Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh masyarakat Kota Pontianak yang memiliki kebiasaan merokok, sementara jumlah pastinya tidak diketahui. Oleh karena itu, teknik pengambilan sampel menggunakan *non-probability sampling* dengan metode *accidental sampling*, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dan memenuhi kriteria sebagai responden (Sugiyono, 2018) Rumus yang digunakan untuk menentukan jumlah sampel adalah rumus Lemeshow. Dari perhitungan yang dilakukan, diperoleh hasil 96,04 atau sekurang-kurangnya sejumlah 100 responden. Kriteria responden ditetapkan sebagai berikut: (1) berdomisili di Kota Pontianak, (2) berusia 15–54 tahun, dan (3) Merupakan perokok aktif (konvensional atau elektrik).

Data dikumpulkan melalui metode survei dengan menggunakan kuesioner yang didistribusikan kepada responden secara daring. Kuesioner berisi pernyataan tertutup yang disusun berdasarkan indikator dari model implementasi kebijakan Edwards III dan teori Ripley & Franklin (1982). Menurut Fink dalam (Sekaran & Bougie, 2016), survei merupakan metode yang efektif untuk memperoleh informasi mengenai sikap, pengetahuan, dan perilaku masyarakat terhadap suatu fenomena kebijakan publik. Hasil penelitian ini akan dianalisis secara kuantitatif dengan bantuan *software* Jamovi versi 2.6.44.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Identitas Responden

Penelitian ini melibatkan 180 responden dengan karakteristik merupakan masyarakat Kota Pontianak berusia 15–54 tahun, yang seluruhnya merupakan perokok aktif, baik konvensional ataupun elektrik. Karakteristik responden dalam penelitian ini dijelaskan berdasarkan beberapa aspek, yaitu jenis kelamin dan usia responden, dengan rincian sebagai berikut: (1) Jenis kelamin: banyaknya responden berjenis kelamin laki-laki sebanyak 74 orang (85,6%) dan responden yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 26 orang (14,4%). (2) Umur: sebagian umur responden 15-20 tahun sebanyak 111 orang (62,2%), usia responden 21-25 tahun sebanyak 47 orang (25,6%), usia responden 26-30 tahun sebanyak 2 orang (1,1%) dan usia responden >30 tahun sebanyak 20 orang (11,1%). Hal ini menunjukkan bahwa dominasi umur perokok di Kota Pontianak diantara 15 sampai dengan 20 tahun.

Guna membuktikan penelitian ini memiliki kualitas yang baik, maka terlebih dahulu akan diuji dengan pengukuran nilai validitas dan reliabilitas penelitian secara internal.

3.2 Uji Validitas dan Reliabilitas

Data yang diperoleh melalui kuesioner kemudian diuji validitasnya dengan cara menghitung koefisien korelasi antara skor setiap item dan skor total. Pengujian ini dilakukan pada tingkat signifikansi 0,05 menggunakan rumus Korelasi *Product Moment Pearson*. Menurut (Sugiyono, 2018), instrumen penelitian berupa kuesioner valid jika mempunyai nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$. Peneliti menghitung nilai validitas saat telah mendapatkan 33 sampel. Nilai r_{tabel} didapatkan dari hasil $df = n-2$ ($33 - 2$) = 31, maka nilai tabel 0,3440. Pengujian validitas untuk variabel X dan Y memiliki nilai korelasi di atas 0,3440, dengan demikian berarti item pernyataan dari variabel Komunikasi dan Implementasi KTR dinyatakan valid.

Uji validitas merupakan tahapan awal yang dilakukan dalam penelitian ini karena data dikumpulkan menggunakan instrumen kuesioner. Pengujian validitas dilakukan dengan metode *Product Moment Pearson* melalui bantuan perangkat lunak Jamovi, yaitu dengan cara membandingkan nilai koefisien korelasi hasil perhitungan tiap butir pertanyaan (r_{hitung}) dengan nilai korelasi acuan (r_{tabel}). Uji validitas digunakan untuk menilai sejauh mana kuesioner mampu mengukur konsep yang seharusnya diukur. Sebuah kuesioner dinyatakan valid apabila setiap butir pertanyaan dapat merepresentasikan informasi secara tepat sesuai dengan tujuan pengukuran instrumen tersebut (Ghozali & Prihanti, 2011). Jika nilai r_{hitung} melampaui r_{tabel} , maka instrumen dinilai valid. Sebaliknya, apabila nilai r_{hitung} berada di bawah r_{tabel} , instrumen tersebut dinyatakan tidak valid (Darma, 2021). Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan menggunakan aplikasi Jamovi dengan indikator Cronbach Alpha. Suatu kuesioner dikategorikan reliabel apabila nilai Cronbach Alpha lebih dari 0,60. Menurut (Sugiyono, 2018), instrumen yang reliabel mampu menghasilkan data yang konsisten ketika digunakan berulang kali untuk mengukur objek yang sama. Dalam penelitian ini, reliabilitas diuji pada variabel X (Komunikasi) dan variabel Y (Implementasi KTR). Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai Cronbach Alpha pada variabel X adalah 0,854 dan pada variabel Y sebesar 0,804, keduanya berada di atas batas minimal 0,60. Oleh karena itu, kuesioner yang digunakan dapat dinyatakan memiliki tingkat reliabilitas yang baik dan layak digunakan sebagai instrumen pengumpulan data yang mendukung tujuan penelitian.

3.3 Uji Asumsi Klasik

Tabel 1. Uji Normalitas

	Statistic	p
Kolmogorov-Smirnov	0.0527	0.700

Pengujian asumsi klasik dilakukan dengan uji normalitas dan uji heteroskedastisitas. Sugiyono (2018) menyatakan bahwa tujuan dari uji normalitas adalah untuk menilai apakah menunjukkan distribusi residu yang bersifat normal. Uji ini menggunakan metode *kolmogorovsmirnov*. Jika nilai signifikansinya Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa distribusi residu mengikuti distribusi normal. Sebaliknya, apabila nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka distribusi residu dianggap tidak normal.

Berdasarkan hasil uji normalitas yang dilakukan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,0527 ($> 0,05$). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini terdistribusi secara normal. Karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, hipotesis nol yang menyatakan bahwa data terdistribusi normal tidak ditolak. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa asumsi normalitas pada

model ini telah terpenuhi, sehingga model regresi yang digunakan layak untuk digunakan pada tahap analisis selanjutnya.

Tabel 2. Uji Heteroskedastisitas

	Statistic	p
Breusch-Pagan	3.05	0.081

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah terdapat ketidaksamaan varians antara residu observasi yang satu dengan observasi yang lain dalam suatu model regresi (Ghozali & Prihanti, 2011). Uji ini menggunakan metode *Breusch-Pagan* yang membandingkan nilai signifikansi dengan hasil uji taraf kepercayaan 5% ($\alpha = 0,05$). Apabila nilai signifikansi (Sig.) $> 0,05$, maka model regresi dinyatakan bebas dari gejala heteroskedastisitas dan memenuhi asumsi klasik. Begitu pula sebaliknya. Berdasarkan hasil uji *Breusch-Pagan* yang dilakukan menggunakan software Janovi, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,081 ($> 0,05$). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak mengalami gejala heteroskedastisitas. Varian residual pada model terdistribusi secara konstan, sehingga model regresi yang digunakan telah memenuhi asumsi klasik dan layak untuk digunakan pada tahap analisis selanjutnya.

3.4 Analisis Regresi Linear Sederhana

Tabel 3. Analisis Regresi Linear Sederhana

Predictor	Estimate	t	p
Intercept	23.863	12.2	<.001
KOM	0.540	10.8	<.001

Teknik analisis data yang digunakan adalah metode analisis regresi linier sederhana, dengan tujuan menyelidiki ada tidaknya pengaruh variabel x (variabel bebas) terhadap variabel Y (variabel bergantung). Menurut Ardial, “Dikatakan sederhana jika jumlah variabel independen sebagai prediktor jumlahnya hanya satu.” (Mawardiningsih, W., & Mediantara, 2021). Analisis Regresi Linear Sederhana adalah metode statistik yang digunakan untuk mengidentifikasi pengaruh satu atau lebih variabel bebas terhadap variabel terikat. Pengujian ini dilakukan untuk mengevaluasi apakah terdapat pengaruh komunikasi terhadap implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Berdasarkan hasil analisis tersebut, diperoleh persamaan regresi linear sederhana yang menggambarkan hubungan antara komunikasi (X) dan implementasi KTR (Y), sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

$$Y = 23,863 + 0,540X$$

Dari persamaan regresi linear sederhana di atas dapat diartikan bahwa semakin baik komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam menyampaikan informasi dan kebijakan KTR, maka semakin tinggi pula implementasi kebijakan tersebut di masyarakat. Dengan kata lain, efektivitas komunikasi menjadi faktor penting dalam mendorong keberhasilan implementasi KTR, karena melalui komunikasi yang jelas dan konsisten, masyarakat dapat lebih memahami, menerima, dan melaksanakan kebijakan yang berlaku.

3.5 Uji t (Partial)

Uji-t merupakan salah satu jenis uji statistik yang bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan antara nilai taksiran dengan nilai (Darma, 2021) yang diperoleh melalui perhitungan. Lebih lengkapnya, tujuannya yaitu untuk menguji hipotesis mengenai perbedaan rata-rata antara dua variabel, serta untuk menentukan apakah perbedaan tersebut signifikan secara statistik. Hipotesis yang diajukan didalam penelitian ini adalah: (1) Jika nilai p (signifikansi) lebih kecil dari tingkat signifikansi (α) yang telah ditentukan, maka hipotesis alternatif diterima dan hipotesis nol (H_0) ditolak. (2) Jika nilai p (signifikansi) lebih besar dari tingkat signifikansi (α) yang telah ditentukan, maka hipotesis nol (H_0) diterima dan hipotesis alternatif (H_a) ditolak.

Dari tabel diatas diperoleh hasil Uji T sebesar $0,000 < 0,05$. Angka tersebut menunjukkan bahwa H_a diterima dan H_0 ditolak. Maka, dapat disimpulkan terdapat pengaruh antara Komunikasi dan Implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

3.6 Uji Koefisien Determinasi

Tabel 4. Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R ²
1	0.629	0.396

Berdasarkan nilai di atas, nilai koefisien determinasi adalah sebesar 0,396 atau sama dengan 39,6%. Nilai tersebut dapat diartikan bahwa sumbangsih dari variabel komunikasi sebesar 39,6 % sisanya 60,4% dapat dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini.

3.7 Uji Koefisien Korelasi

Berdasarkan interval koefisien yang telah ditentukan, hubungan antara dua variabel dapat dikategorikan berdasarkan nilai R sebagai berikut: 0,00 – 0,199 menunjukkan hubungan yang sangat rendah, 0,20 – 0,399 menunjukkan hubungan rendah, 0,40 – 0,599 menunjukkan hubungan sedang, 0,60 – 0,799 menunjukkan hubungan kuat, dan 0,80 – 1,00 menunjukkan hubungan yang sangat kuat. Berdasarkan hasil pengolahan data yang terdapat dalam Tabel 6, nilai R yang diperoleh adalah 0,629. Nilai ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel komunikasi (X) dan implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) (Y) termasuk dalam kategori hubungan yang kuat. Hal ini mengindikasikan bahwa komunikasi yang efektif memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi KTR, dengan tingkat hubungan yang cukup tinggi, tetapi belum mencapai tingkat yang sangat kuat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semakin baik komunikasi yang dilakukan, semakin efektif pula implementasi kebijakan KTR di masyarakat.

IV. KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap implementasi program Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Berdasarkan model implementasi kebijakan Edwards III, komunikasi merupakan salah satu faktor utama yang menentukan sejauh mana suatu kebijakan dapat dijalankan secara efektif. Dalam penelitian ini, komunikasi berperan besar terhadap implementasi KTR dengan sumbangsih pengaruh sebesar 39,6%, sementara sisanya 60,4% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik tidak hanya bergantung pada isi kebijakan itu sendiri, tetapi juga pada sejauh mana kebijakan tersebut dikomunikasikan dengan baik kepada para pelaksana dan masyarakat yang menjadi sasaran.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sukandar (2017) yang menemukan bahwa komunikasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi Kawasan Tertib Lalu Lintas di Kabupaten Mempawah. Ia menjelaskan bahwa tingkat kepatuhan, kelancaran, dan tercapainya tujuan dapat meningkat melalui komunikasi yang efektif. Temuan serupa juga dikemukakan dalam penelitian (Rangkuti, 2021), yang menegaskan bahwa kejelasan pesan, konsistensi informasi, serta partisipasi masyarakat sangat memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan daerah. Dengan demikian, hasil penelitian ini menguatkan bukti empiris bahwa komunikasi yang efektif merupakan elemen penting yang tidak dapat diabaikan dalam proses implementasi kebijakan publik, termasuk kebijakan KTR.

Selain itu, penelitian oleh (Gunawan et al., 2022) menunjukkan bahwa komunikasi publik Kemenkes melalui analisis SOSTAC terbukti berhasil meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap vaksinasi yang saat itu menjadi kebijakan pemerintah setempat. Hasil ini menegaskan bahwa strategi komunikasi yang baik melalui penyebaran informasi yang menarik, edukatif, dan konsisten, mampu meningkatkan kesadaran serta perilaku masyarakat terhadap kebijakan kesehatan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa komunikasi publik yang dilakukan pemerintah Kota Pontianak berkontribusi nyata terhadap efektivitas implementasi kawasan tanpa rokok. Komunikasi yang intensif melalui sosialisasi, media promosi, serta papan informasi bertuliskan larangan merokok terbukti meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya KTR.

Sebaliknya, Penelitian yang dilakukan oleh (Silalahi, 2018) di Surabaya mengidentifikasi bahwa salah satu hambatan terbesar dalam penerapan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok adalah kurangnya komunikasi publik yang efektif. Minimnya sosialisasi dan informasi membuat sebagian masyarakat tidak memahami aturan yang berlaku, sehingga tingkat pelanggaran masih tinggi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa ketika komunikasi tidak dikelola dengan baik, baik dari sisi isi pesan maupun saluran penyampaian, maka implementasi kebijakan cenderung gagal mencapai sasaran. Oleh karena itu, temuan penelitian ini semakin menegaskan pentingnya peran komunikasi sebagai salah satu variabel kunci dalam teori implementasi kebijakan Edward III.

Dengan demikian, secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa komunikasi memiliki peranan vital dalam keberhasilan implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok. Komunikasi yang efektif memungkinkan pesan kebijakan tersampaikan secara jelas, konsisten, dan dapat dipahami oleh masyarakat serta pelaksana di lapangan. Hasil penelitian ini juga memberikan gambaran bahwa meskipun komunikasi memberikan kontribusi besar, masih terdapat faktor lain, seperti sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi yang juga perlu diperhatikan agar implementasi kebijakan berjalan optimal. Untuk itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi faktor-faktor lain yang berpotensi memengaruhi implementasi KTR, seperti komitmen lembaga, dukungan masyarakat, penegakan hukum, serta budaya merokok yang masih melekat di lingkungan sosial.

REFERENSI

- Barage, E. (2024). *Tim Satgas Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Kota Pontianak gelar razia di kawasan umum*. <https://pontianakinfo.disway.id/read/9637/tim-satgas-kawasan-tanpa-rokok-ktr-kota-pontianak-gelar-razia-di-kawasan-umum>
- Darma, B. (2021). *STATISTIKA PENELITIAN MENGGUNAKAN SPSS (Uji Validitas, Uji Reliabilitas, Regresi Linier Sederhana, Regresi Linier Berganda, Uji t, Uji F, R²)*. GUEPEDIA. https://books.google.co.id/books/about/STATISTIKA_PENELITIAN_MENGGUNAKAN_SPSS_U.htm?id=acpLEAAQBAJ&redir_esc=y
- Dinas Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana, P. P. dan P. A. (DPPKBPPPA) K. P. (2024). *Kegiatan pengawasan dan penegakan Perda KTR yang dilaksanakan oleh Tim Satgas KTR Kota Pontianak*. <https://dppkbpppa.pontianak.go.id/informasi/berita/kegiatan-pengawasan-dan-penegakan-perda-ktr-yang-dilaksanakan-oleh-tim-satgas-ktr-kota-pontianak>
- Ghozali, I., & Prihanti, D. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS versi 19*. https://www.academia.edu/86315138/Ghozali_Imam_2011_Aplikasi_Analisis_Multivariate_Dengan_Program_SPSS_versi_19_Semarang_Universitas_Diponegoro
- Gunawan, R., Gunawan, R., & Toni, A. (2022). Strategi Komunikasi Publik Kemenkes RI Dalam Membangun Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat Untuk Vaksinasi Covid-19 Melalui Model SOSTAC. *Jurnal Komunikasi*, 16(1), 52–73. <https://doi.org/10.21107/ilkom.v16i1.13817>
- Kalbar, A. (2022). *Pemkot Pontianak deklarasi kawasan tanpa rokok untuk lindungi anak*. <https://kalbar.antarane.ws.com/berita/506921/pemkot-pontianak-deklarasi-kawasan-tanpa-rokok-untuk-lindungi-anak>
- Mawardiningsih, W., & Mediantara, Y. (2021). *TERHADAP INTERAKSI MASYARAKAT LANGSUNG DI MASA*. 2(2), 83–88
- Pratama, B. T., Wirasari, I., & Nurbani, S. (2021). PERANCANGAN KAMPANYE SOSIAL TENTANG BAHAYA MEROKOK KETIKA BERKENDARA DI KOTA BANDUNG. *E-Proceeding of Art & Design*, 8(2), 210–225.
- Rangkuti, Z. A., & Rangkuti, M. R. (2021). Komunikasi Kebijakan Publik dalam Implementasi Program E-Parking di Kota Medan. *Kalijaga Journal of Communication*, 3(2), 141–151. <https://doi.org/10.14421/KJC.32.04.2021>
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research Methods for Business: A Skill Building Approach* (7th ed.). John Wiley & Sons Ltd.
- Silalahi, T. C. C. (2018). *EFEKTIFITAS PELAKSANAAN KAWASAN TANPA ROKOK*.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Supiyandi A., Fernando J., Hildawati., & H. F. S. (2025). Pengaruh Keaktifan Mahasiswa dalam Berorganisasi Terhadap Kemampuan Public Speaking Mahasiswa Fakultas. 6(1), 88–98.
- Sukandar, A. (2017). Pengaruh Komunikasi Terhadap Keberhasilan Implementasi Program Kawasan Tertib Lalu Lintas Dikabupaten Mempawah. *Publika*, 6(1), 1–17.
- World Health Organization, & K. K. R. I. (2021). *Global Adult Tobacco Survey Indonesia Report 2021*. <https://www.who.int/indonesia/id/news/detail/22-08-2024-ministry-of-health-and-who-release-global-adult-tobacco-survey-indonesia-report-2021>